

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL

Putri Agus Suyanto
Putriaguss26@gmail.com
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to analyze and test economic growth (GRDP), the General Allocation Fund (DAU), and the Special Allocation Fund (DAK). The population in this study were all regencies or cities in the area of East Java Province, with a total sample of 38 regencies or cities in the 2015-2017 study period so that a sample of 114 respondents was obtained. This study uses a quantitative approach. The type of data used is secondary data, in the form of a budget realization report presented in the BPK-RI inspection results report and the Regency or City Central Statistics Agency in East Java Province from 2015 to 2017. This test uses multiple linear regression analysis techniques. The results showed: 1) Economic growth affected Capital Expenditure in Regency or City Governments in East Java Province, 2) General Allocation Funds positively affected Capital Expenditures in Regency or City Governments in East Java Province, 3) Special Allocation Funds did not affect Capital Expenditures on Regency or City Governments in East Java Province.

Keywords: economic growth, general allocation funds, special allocation funds

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pertumbuhan ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah sampel penelitian sebesar 38 Kabupaten atau Kota dengan periode penelitian 2015-2017 sehingga diperoleh sampel 114 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa laporan realisasi anggaran yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI dan Badan Pusat Statistik Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 hingga 2017. Pengujian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur, 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur, 3) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh pada tidak atau berkembangnya suatu daerah tersebut. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah

wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah kemasyarakat. Laporan keuangan yang wajib dipublikasikan adalah neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan efektivitas (*value of money*) dari pemerintah daerah, maka kita dapat melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu (Ghozali, 2011). Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, 2008). Selama ini, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk alokasi belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Menurut Saragih (2008) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Darwanto dan Yuli (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Berdasarkan latar belakang diatas, dimana belanja modal merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang seharusnya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketersediaan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat maka yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah faktor alokasi belanja modal pemerintah daerah dengan mengangkat judul: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2015 -2017.

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak terarah agar penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada sampel satuan kerja perangkat daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur pada tahun 2015 -2017. Penelitian ini akan lebih terfokus pada masing-masing variabel guna mendapatkan penjelasan dan pemahaman tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

TINJAUAN TEORETIS

Desentralisasi Fiskal

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 7 dan UU No 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 8, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian dalam membuat wewenang keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan ditingkat pemerintah daerah. Kelebihan system ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada didaerah dapat diputuskan didaerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan dimana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi oknum tertentu, daerah justru semakin bergantung kepada pemerintah pusat, dan marakannya korupsi para pejabat publik. Realitas hubungan fiskal antara daerah-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Indikator desentralisasi fiskal adalah Rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah.

Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Menurut Kuncoro (2008: 22) Otonomi daerah berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 dan UU No.5 Tahun 1979 adalah Hak, Wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sedangkan menurut UU No.22 Tahun 1999 tonomi Daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Masalah yang penting dalam kerangka otonomi daerah adalah menyangkut pembagian/perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah sangat penting, karena keadilan sesungguhnya harus meliputi dua hal yaitu keadilan politik dan keadilan ekonomi (Indira, 2009).

Anggaran Daerah

Mardiasmo (2008) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Menurut Hansen dan Mowen (2009) anggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Menurut Mardiasmo (2008), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Anggaran operasional, merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk anggaran operasional antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan. 2) Anggaran modal, merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya adalah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Berbagai definisi atau pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Djayasinga (2007) dalam Nurul (2008) antara lain : 1) APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah. 2) APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu. 3) APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara monev dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. (Halim, 2009). Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan pemerintah daerah, proses penerimaan penyusunan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Haryadi, *et al*, 2001 dalam Pratiwi, 2008). Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selama periode 2015-2017 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk penyusunan anggaran. Agar penelitian ini jelas permasalahannya dan terfokus, maka penulis sebagai peneliti mengadakan pembatasan dalam penelitian sebagai berikut : 1) Sumber dari laporan realisasi APBD pada seluruh pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015 - 2017. 2) Hasil wawancara pada Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur periode 2015 - 2017. 3) Dokumen kinerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur dalam membandingkan anggaran dengan realisasi.

Dana Alokasi Umum

Menurut UU No 23 Tahun 2014 bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat *block grant*, yang artinya daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah. Menurut Halim (2009) dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana

alokasi umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 2008). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. Produk domestik regional bruto PDRB dapat digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto dan Yuli, 2007). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Peningkatan

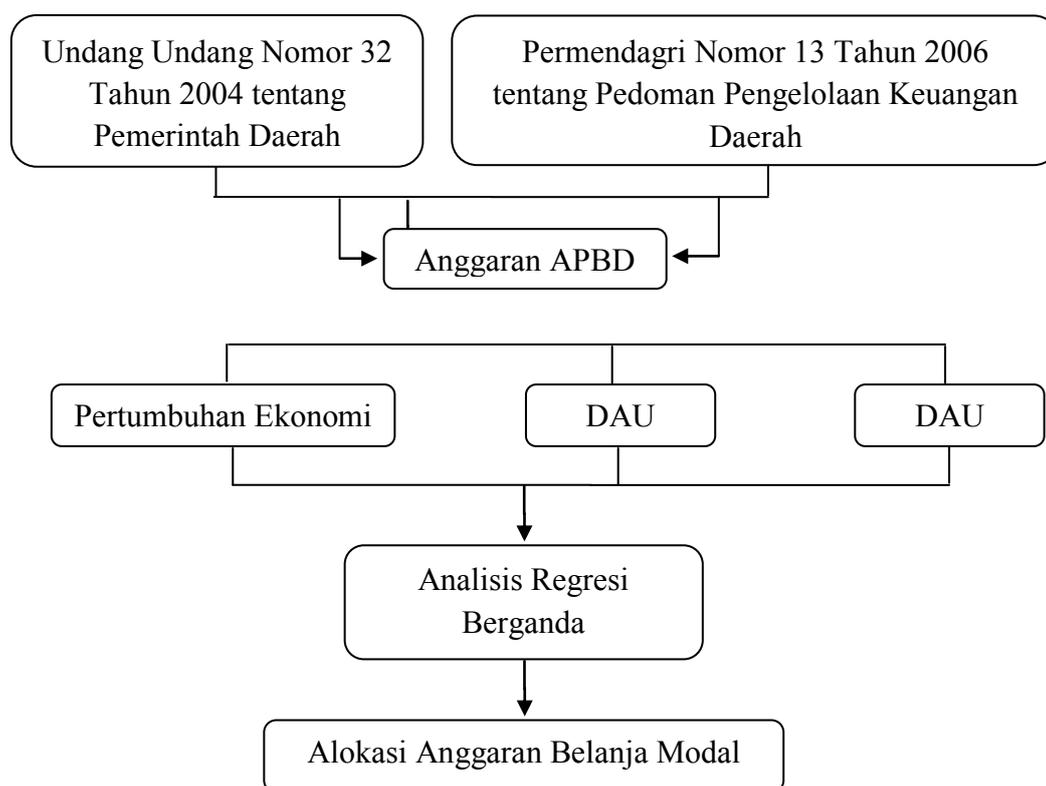
kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2010). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penelitian Terdahulu

Darwanto dan Yuli (2007) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) tentang Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. Hasil penelitian ini membuktikan DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita, belanja modal berpengaruh positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD, PAD berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap PAD. Anggiat Situngkir (2009) meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi anggaran Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Pemkab Sumatra Utara. Hasil penelitian tersebut variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Syafitri (2009), dimana Penelitiannya bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana alokasi umum (DAU) pada Alokasi belanja modal di Provinsi Sumatra Utara dan hasil penelitiannya secara parsial menunjukkan bahwa penerimaan asli daerah (PAD) memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum tidak secara signifikan mempengaruhi belanja modal. Dan secara simultan pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan dana alokasi umum (DAU) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Perbedaan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya (Nugroho, 2010). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penelitian Lin dan Liu (2000) bahwa upaya desentralisasi memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Darwanto dan Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal. Oleh karena itu, untuk hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut :

H₁ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Hasil penelitian Darwanto dan Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Prakoso (2008) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut :

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU No.33/2004). Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009), dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan penemuan empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan merupakan penelitian yang tergolong metode kausalitas. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014: 13). Penelitian kausalitas merupakan penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel (Sanusi, 2014 : 14). Populasi adalah kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2014: 87). Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Laporan Realisasi APBD pada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Selama tiga tahun yaitu dari tahun 2015-2017.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah cara peneliti mengambil sampel atau contoh yang representatif dari populasi yang tersedia (Sanusi, 2014: 88). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pengambilan secara acak sesuai tujuan atau target dengan pertimbangan kriteria tertentu. Berdasarkan metode tersebut, maka kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten/Kota yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur periode 2015 - 2017. 2) Kabupaten/Kota yang secara berturut-turut menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2015 - 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD tahun 2015-2017 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2014: 33) variabel merupakan segala sesuatu sifat atau nilai dari obyek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, menggunakan dua macam variabel, yaitu: 1) Variabel Bebas (*Independen*) yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependen*). Variabel *independen* dalam penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 2) Variabel Terikat (*Dependen*) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (*independen*). Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah alokasi anggaran belanja modal.

Definisi Operasional Variabel

Variabel *dependen* adalah variabel yang dipengaruhi adanya variabel *independen* / bebas. Dalam penelitian ini variabel *dependen* yang digunakan adalah belanja modal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.

Variabel Independen

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu variabel bebas, variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) terdiri dari : 1) Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita (Boediono, 2008). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi dalam rangka memecahkan masalah penelitian maupun pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis perhitungan menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik yang dikenal dengan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) yang bertujuan untuk menentukan pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Statistik Deskriptif

Penyajian Statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2010: 154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai pola distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas ada dua cara yang digunakan yaitu analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rumus *Kolmogorov-Smirnov* yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

H_0 : Data terdistribusi secara normal

H_a : data tidak terdistribusi secara normal

Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas atau nilai signifikansinya $\geq 0,05$ namun apabila data yang dihasilkan nilai probabilitasnya atau nilai signifikansinya $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini menggunakan uji multikolinieritas yang bertujuan untuk mengetahui model regresi ditemukan adanya korelasi dengan variabel independen (Ghozali, 2010: 105). Jika tidak ada korelasi, maka model regresi tersebut dikatakan baik. Uji

multikolinieritas pada penelitian ini dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) yaitu sebagai berikut: 1) Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. 2) Jika nilai *tolerance* < 0,1 dan nilai VIF > 10 maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka disebut homoskedastisitas dan jika *variance* berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada berbetuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka telah terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2010: 105).

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linier berganda yang merupakan alat ukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2010: 96). Penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen (pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) dan satu variabel dependen (belanja modal), sehingga menggunakan persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$BM = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \varepsilon_i$$

Keterangan:

BM	: Belanja Modal
α	: Konstanta
$\beta_{1,2,3,4}$: Koefisien variabel bebas
PE	: Pertumbuhan Ekonomi
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
ε	: <i>error</i>

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dilihat pada *adjusted Rsquare*. *Adjusted Rsquare* merupakan *Rsquare* yang telah disesuaikan dan biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan menjelaskan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2010: 97). Dalam penelitian ini, mengukur pengaruh variabel bebas: pertumbuhan ekonomi (X_1), dana alokasi umum (X_2) dan dana alokasi khusus (X_3) terhadap variabel terikat: Belanja Modal (Y). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin kuat kemampuan model regresi yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya.

Uji F

Uji F (Simultan) atau *Analysis of Variance* (ANOVA dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi linear berganda. Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji F

yaitu untuk menguji variabel pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Adapun prosedur pengujian yang digunakan, sebagai berikut : Uji F dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Jika $p\text{-value}$ (pada kolom sig.) $>$ *level of significant* (0,05) maka variabel pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal. b) Jika $p\text{-value}$ (pada kolom sig.) $<$ *level of significant* (0,05) maka variabel pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji $t\text{-test}$. Menurut (Ghozali, 2010: 98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α (asumsi tarif nyata 0,05) maka dapat dikatakan adanya hubungan yang kuat atau positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah kriteria pengujian ini: a) Jika nilai sig $<$ 0,05, maka hipotesis diterima yang menunjukkan variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. b) Jika nilai sig \geq 0,05, maka hipotesis ditolak yang menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini sampel data yang digunakan adalah Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur dengan periode penelitian antara 2015 sampai dengan 2017. Untuk teknik analisis dengan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, kelayakan model, koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan tujuan menganalisis dan membuktikan hipotesis dari pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Secara administratif, provinsi ini terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota. Provinsi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah timur dengan Pulau Bali; sebelah selatan dengan Samudera Indonesia; dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, perekonomian Jawa Timur menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan. Hal ini bisa dilihat dari besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang secara rata-rata berada di atas angka 5 persen selama periode 2010 hingga 2017 yang merupakan indikasi adanya peningkatan produksi barang dan jasa secara progresif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,45 persen sepanjang 2017 atau lebih tinggi daripada capaian nasional. Belanja Daerah menurut UU No.33 Tahun 2004, Belanja daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah tertinggi selama tahun 2015 - 2017 dimiliki Kota Surabaya sedangkan belanja daerah terendah dimiliki oleh Kota Trenggalek pada tahun 2015. Belanja Daerah tidak hanya ditunjukkan untuk pengembangan infrastruktur industri, tetapi juga untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian pelayanan kepada publik.

Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini data penelitian didasarkan pada laporan keuangan kabupaten/kota provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) dengan tahun penelitian selama tiga tahun yaitu 2015-2017. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1
Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	2015	2016	2017	Unit Analisis
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	38	38	38	114
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tidak mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	(0)	(0)	(0)	(0)
Jumlah Unit Analisis	38	38	38	114

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Pada Tabel 1 tersebut, peneliti menggunakan unit sampel sebanyak 114 laporan keuangan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* dalam proses seleksi pemilihan sampel, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 114 unit sampel.

Data-data tersebut diperoleh dari BPK dan PDBR Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Berikut ini merupakan daftar nama pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 2
Daftar Nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bangkalan	20	Kabupaten Pasuruan
2	Kabupaten Banyuwangi	21	Kabupaten Ponorogo
3	Kabupaten Blitar	22	Kabupaten Probolinggo
4	Kabupaten Bojonegoro	23	Kabupaten Sampang
5	Kabupaten Bondowoso	24	Kabupaten Sidoarjo
6	Kabupaten Gresik	25	Kabupaten Situbondo
7	Kabupaten Jember	26	Kabupaten Sumenep
8	Kabupaten Jombang	27	Kabupaten Trenggalek
9	Kabupaten Kediri	28	Kabupaten Tuban
10	Kabupaten Lamongan	29	Kabupaten Tulungagung
11	Kabupaten Lumajang	30	Kota Batu
12	Kabupaten Madiun	31	Kota Blitar
13	Kabupaten Magetan	32	Kota Kediri
14	Kabupaten Malang	33	Kota Madiun
15	Kabupaten Mojokerto	34	Kota Malang
16	Kabupaten Nganjuk	35	Kota Mojokerto
17	Kabupaten Ngawi	36	Kota Pasuruan
18	Kabupaten Pacitan	37	Kota Probolinggo
19	Kabupaten Pamekasan	38	Kota Surabaya

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan banyaknya data yang digunakan, nilai minimum dan maximum, rata-rata, dan standar deviasi. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan belanja modal daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015 sampai 2017. Hasil dari analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 22, dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	114	-2.66	21.95	5.3987	2.29418
Dana Alokasi Umum	114	92.842.136.800	1.709.892.845.000	928.156.258.497,56	310.227.617.090.05
Dana Alokasi Khusus	114	581.360.000	727.010.713.446	208.247.891.819,52	165.566.800.807,78
Belanja Modal	114	94.234.624.369	2.517.618.139.614	443.432.339.454,21	344.904.551.967,57
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Pertumbuhan Ekonomi

Nilai minimum pertumbuhan ekonomi diperoleh Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 sebesar -2,66%, hal ini disebabkan adanya penurunan pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 14,85%. Hal tersebut dikarenakan produk domestik regional bruto (PDRB) pada tahun 2014 sebesar 40,50% tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 25,56%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai maksimum sebesar 21,95% diperoleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016, didorong oleh besarnya laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian (khususnya sektor Migas) sebagai sektor penunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal ini kebalikannya dengan Kabupaten Bangkalan. Dari data penelitian yang telah dikumpulkan selama 3 tahun diperoleh nilai rata-rata (*mean*) dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40% dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 2,29%. Besarnya nilai standar deviasi dibanding nilai *mean* menunjukkan bahwa distribusi data cenderung fluktuatif.

Dana Alokasi Umum

Nilai minimum dana alokasi umum diperoleh Kota Mojokerto pada tahun 2015 sebesar Rp 92.842.136.800 milyar, penurunan Dana Alokasi Umum yang dimiliki Kota Mojokerto menunjukkan bahwa kecilnya ketergantungan Kota Mojokerto terhadap pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya atau dapat disimpulkan bahwa Kota Mojokerto bisa mandiri dalam membiayai belanja daerahnya. Sedangkan Dana Alokasi Umum dengan nilai maksimum sebesar Rp 1.709.892.845.000 milyar diperoleh Kabupaten Jember pada tahun 2016, peningkatan Dana Alokasi Umum yang diperoleh oleh Kabupaten Jember menunjukkan bahwa Kabupaten Jember masih sangat bergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam membiayai belanja daerahnya. Dari data penelitian yang telah dikumpulkan selama 3 tahun diperoleh nilai rata-rata (*mean*) dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 928.156.258.497,56 milyar dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 310.227.617.090.05 milyar. Kecilnya nilai standar deviasi dibanding nilai *mean* menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Dana Alokasi Khusus

Nilai minimum Dana Alokasi Khusus diperoleh Kota Malang pada tahun 2015 sebesar Rp 581.360.000 milyar. Penurunan Dana Alokasi Khusus yang dimiliki Kota Malang, kecilnya ketergantungan Kota Malang terhadap pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya atau dengan kata lain bisa mandiri dalam membiayai belanja daerahnya. Sedangkan Dana Alokasi Khusus dengan nilai maksimum sebesar Rp 727.010.713.446 milyar diperoleh Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015, peningkatan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh oleh Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi masih sangat bergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam membiayai belanja daerahnya. Dari

data penelitian yang telah dikumpulkan selama 3 tahun diperoleh nilai rata-rata (*mean*) dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 208.247.891.819,52 milyar dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 165.566.800.807,78 milyar. Kecilnya nilai standar deviasi dibanding nilai *mean* menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Belanja Daerah

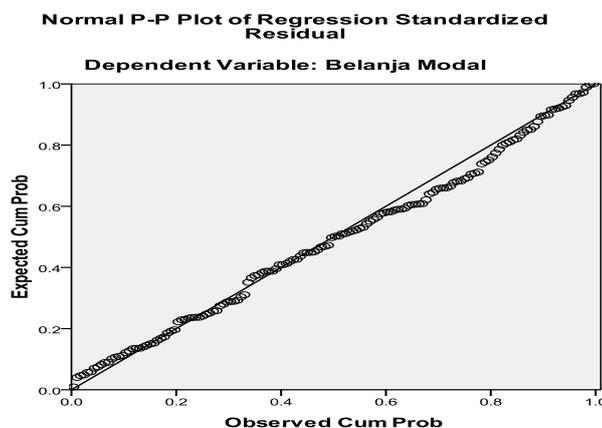
Nilai minimum Belanja Daerah sebesar Rp 94.234.624.369 milyar diperoleh Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015. Penurunan belanja daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek dengan wilayah daerah yang tidak begitu luas sebesar 136,74 km² dan kepadatan penduduk sebesar 1.423,87 jiwa (dalam km²). Sedangkan belanja Daerah dengan nilai maksimum diperoleh Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar Rp 2.517.618.139.614 milyar dengan wilayah daerah yang begitu luas sebesar 350,54 km² dan kepadatan penduduk sebesar 8.126,27 jiwa (dalam km²). Dari data penelitian yang telah dikumpulkan selama 3 tahun diperoleh nilai rata-rata (*mean*) dari Belanja daerah sebesar Rp 443.432.339.454,21 milyar dan nilai standar deviasi sebesar Rp 344.904.551.967,57 milyar. Kecilnya nilai standar deviasi dibanding nilai *mean* menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis telah memenuhi syarat dari keempat uji asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedasitas. Perhitungan uji asumsi klasik tersebut sebagai berikut:

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dengan menggunakan analisis grafik dapat menggunakan histogram dan *Normal Probability Plot*. Dalam penelitian ini, grafik yang digunakan untuk pengujian normalitas data adalah grafik *Normal Probability Plot* atau yang bisa disebut grafik *P-plot*. Pada grafik *P-plot* distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan distribusi dari data digambarkan dengan *ploting*. Jika data berdistribusi normal maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Gambar 3 berikut ini menyajikan grafik *P-plot* yang dapat menggambarkan distribusi data. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS uji normalitas didapat grafik sebagai berikut:



Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Gambar 2
Grafik P-plot

Berdasarkan Gambar 3 hasil uji normalitas data dengan menggunakan *P-plot* grafik terlihat bahwa penyebaran titik-titik mengikuti arah garis diagonal, namun titik-titik menyebar jauh disekitar garis diagonal. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau dengan kata lain model regresi layak dipakai karena memenuhi salah satu asumsi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu penyebaran titik-titik yang mengikuti garis diagonal. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2010). Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000064
	Std. Deviation	2,88336276
Most Extreme Differences	Absolute	,217
	Positive	,217
	Negative	-,172
Kolmogorov-Smirnov Z		2,319
Asymp. Sig. (2-tailed)		,280

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4 diatas hasil pengujian normalitas terhadap 114 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Asymp.sig.(2-tailed)* sebesar 0,280 lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas adalah dengan menggunakan nilai *Tolerance value* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas adalah nilai *tolerance value* diatas 0,10 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dibawah 10.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pertumbuhan Ekonomi	,992	1.008
Dana Alokasi Umum	,768	1.303
Dana Alokasi Khusus	,763	1.311

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Dari hasil yang telah dianalisis dan diuji yang menunjukkan pada Tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance value* diatas 0,10.

Dengan demikian disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak ada yang mengandung adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Menurut Suliyanto (2011) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut (*times-series*) atau ruang (*cross section*). Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson yang dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.660

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

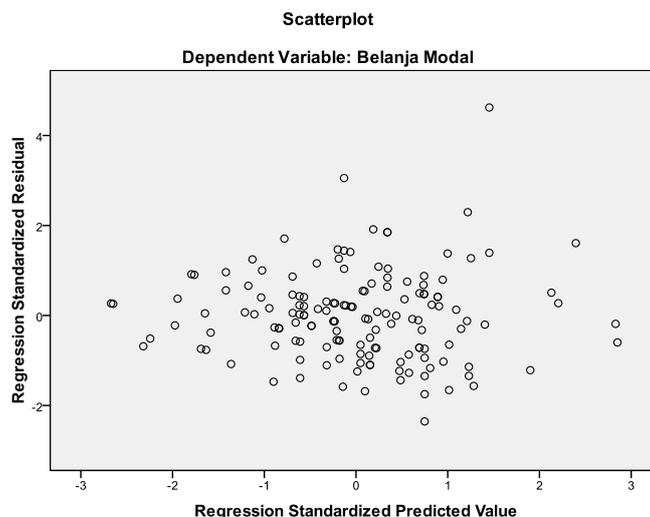
b. Dependent Variable: belanja Modal

Sumber: Hasil Output SPSS

Pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,669 terletak diantara -2 sampai +2 maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama (*konstan*) atau yang bisa disebut homokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dapat menggunakan metode analisis grafik. Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati grafik *scatterplot*. Jika *scatterplot* disajikan pada Gambar 4 berikut ini:



Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Gambar 3
Grafik *scatterplot* Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tampilan pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Hasil Estimasi Koefisien Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	2.115	1,132	
Pertumbuhan Ekonomi	4.004	1,238	,266
Dana Alokasi Umum	0.409	,104	,368
Dana Alokasi Khusus	0.285	,196	,137

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Pada Tabel 7 di atas dapat diamati bahwa hasil pengujian memperoleh angka persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BM = 2.115 + 4.005PE + 0.409DAU + 0.285DAK + e$$

Goodness of Fit (Uji Kelayakan Model)

Menurut Ghozali (2010:97), pengujian *Goodness of Fit* digunakan untuk menguji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian. Model pengujian yang diukur adalah nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik uji F. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM). Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependennya dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variansi perubahan pada variabel dependen. Berikut ini hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 8 :

Tabel 8
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,510 ^a	,260	,239	3.008

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

b. Dependent Variable: belanja Modal

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Nilai koefisiensi determinasi atau *Rsquare* dalam penelitian ini sebesar 0,239 atau sebesar 23,9%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 2015-2017 mempengaruhi Belanja Modal (BM) adalah sebesar 23,9% dan sisanya sebesar 76,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji variabel pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh bersamaan terhadap variabel belanja modal. Kriteria model yang digunakan adalah sebagai berikut: a) P-value < 0,05 menunjukkan bahwa uji

model ini layak untuk digunakan pada penelitian. b) P-value > 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

Tabel 9
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.491	3	1.164	12.861	.000 ^a
	Residual	9.952	110	9.047		
	Total	1.344	113			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 9 diatas diketahui nilai F_{hitung} sebesar 12.861 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai F memberikan hasil yang signifikan, maka model regresi dikatakan sesuai sehingga dapat dikatakan model layak digunakan dalam penelitian lebih lanjut.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Dimana tingkat signifikansi $\leq 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Pengujian Hipotesis
Coefficients^a

Model		t_{hitung}	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
1	(Constant)	2,115	,064	
	Pertumbuhan Ekonomi	3,233	,002	Diterima
	Dana Alokasi Umum	3,927	,000	Diterima
	Dana Alokasi Khusus	1,458	,148	Ditolak

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan hasil uji t dan tingkat signifikansi diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengujian hipotesis pertama (Pertumbuhan Ekonomi)

H₁: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3.233 dengan tingkat signifikan 0,002 nilai signifikan tersebut < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengujian hipotesis kedua (Dana Alokasi Umum)

H₂: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah

Pengaruh variabel dana alokasi umum terhadap belanja daerah berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3.927 dengan tingkat signifikan 0,000 nilai signifikan tersebut < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima yang berarti bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pengujian hipotesis ketiga (Dana Alokasi Khusus)

H₃: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh variabel dana alokasi khusus terhadap belanja daerah berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1.458 dengan tingkat signifikansi 0,148 nilai signifikansi tersebut > 0.05 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H₁ ditolak yang berarti bahwa variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pembahasan

Uraian berikut ini tentang pembahasan tentang hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari hasil perhitungan uji t diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai pengaruh berikut:

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Kuncoro (2009) yang menyatakan pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Selain itu juga sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Badan Analisa Fiskal (dalam Kusumastuti, 2010), yang menyatakan bahwa persentase kenaikan PDB atau biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi, berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor eksternal yang menentukan penerimaan pajak.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Maka dari itu semakin tinggi DAU yang diperoleh dari pemerintah pusat maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2008) dan Harianto Adi (2007), memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat, bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Tetapi hasil bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Yovita (2011), menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa besar kecilnya dana alokasi khusus yang diterima oleh daerah maka tidak berpengaruh belanja modal yang dialokasikan oleh daerah. Sedangkan DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggungjawab dan akuntabilitas bagi pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (UU No.33/2004).

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putranto (2017), menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dimana dana alokasi khusus mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -1.727 sedangkan t_{tabel} sebesar 1.974017 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,087 > \alpha = 0,05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh tidak berpengaruh terhadap belanja modal, ini disebabkan karena besarnya dana alokasi khusus relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, seperti DAU dan DBH sehingga peningkatan DAK hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tercipta dari infrastruktur atau sarana dan prasarana yang baik, infrastuktur atau sarana dan prasarana didapat dari belanja modal, sedangkan dalam penelitian ini pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja modalnya dengan baik karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan.

Tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Situngkir (2009), menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal, dimana nilai t_{hitung} sebesar 2.692, sedangkan t_{tabel} sebesar 1.974 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,009 > \alpha = 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada seluruh kabupaten/kota provinsi jawa timur periode 2015-2017. Berdasarkan hasil

pengujian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS pada pembahasan bab 1 sampai dengan 3 sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain : 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi belanja langsung daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar. Beberapa pemerintah daerah dengan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang besar memiliki pengeluaran daerah yang besar pula, pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung justru memiliki belanja modal yang rendah. Sama halnya dengan PAD, DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja modal / belanja operasional. 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan DAK kecil atau kurang optimal dari pemerintah pusat dapat mempengaruhi Belanja Modal, sebab pemanfaatan DAK diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana karena akan menambah aset pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut : Untuk meningkatkan belanja modal maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber lain diluar variabel dalam penelitian ini dengan lebih baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah karena sehingga dapat mencukupi daerah dan lebih leluasa mengalokasikan belanja modal. 2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sampel yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih dan mengambil sampel melalui periode penelitian. 3) Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makro ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Z., dan Y. S. Mulyadi. 2009. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Darwanto dan Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*. 26-28 Juli.
- Devas, N. 2008. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Fisher, R.C. 2008. *State And Local Public Finance*, Richard N.Irwin. Chichago
- Ghozali, I. 2010. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2009. *Akutansi Sektor Publik: Akutansi Keuangan Daerah*, Edisi ke-4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A, dan S.Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hariato, D. dan P. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Indira. B. 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga Jakarta.

- Kawedar. 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Pendekatan penganggaran daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2008. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Andi. Yogyakarta.
- Prakoso, K. B. 2007. Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pengkab Sumatra Utara. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Saragih, J. P. 2008. *Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia. Indonesia.
- Situngkir, A. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara).
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, S. 2007. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Syafitri, I. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).